STRATEGI PENGELOLAAN PPI SODOHOA DALAM UPAYA MENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN DI KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA

MANAGEMENT STRATEGY OF FISH SALE CENTRE (PPI) SODOHOA IN EFFORT TO IMPROVE FISHERMEN'S INCOME IN KENDARI CITY, SOUTH EAST SULAWESI

YUSRIANI HALMIN

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

STRATEGI PENGELOLAAN PPI SODOHOA DALAM UPAYA MENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN DI KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Ilmu Perikanan

Disusun dan diajukan oleh

YUSRIANI HALMIN

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

ABSTRAK

YUSRIANI HALMIN. *Strategi Pengelolaan PPI Sodohoa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara* (dibimbing oleh Aris Baso dan Achmar Mallawa).

Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) Manajemen operasional dan pendapatan unit penangkapan yang memanfaatkan prasarana/fasilitas di PPI Sodohoa, (2) proses pemasaran produksi hasil tangkapan nelayan dalam upaya meningkatkan pemasaran yang efisien, dan (3) dapat menyususn strategi pengelolaan PPI Sodohoa dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – April Tahun 2013 di PPI Sodohoa Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei dengan mewawancarai enam puluh lima pelaku tataniaga di PPI Sodohoa sebagai responden. Pengambilan sampel yaitu dengan *probability sampling* . Data dianalisis dengan menggunakan analisis pendapatan, analisis pemasaran dan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata unit penangkapan yang melakukan kegiatan di PPI Sodohoa dapat dikatakan menguntungkan, dimana R/C ratio terbesar yaitu pada unit penangkapan purse seine sebesar 1,96 dan yang terkecil yaitu bagang sebesar 1,42. Proses pemasaran di PPI Sodohoa tidak terlalu panjang dan relatif sederhana, PPI Sodohoa menurut IE berada pada sel 1 yaitu posisi yang menguntungkan, walaupun kekuatan dari PPI ini relatif kecil, untuk itu diperlukan strategi internal dan eksternal dengan cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, disatu sisi secara bersamaan meminimalisasi dan mendorong kelemahan menjadi kekuatan. PPI Sodohoa ini dalam pengelolaannya masih perlu ditingkatkan dengan meningkatkan fasilitas yang ada terutama lantai lelang dan dermaga tambat labuh di PPI Sodohoa.

Kata Kunci : PPI, Strategi Pengelolaan, Pendapatan

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Yusriani Halmin
Nomor Mahasiswa	:	P3300211005
Program Studi	:	Ilmu Perikanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2013
Yang Menyatakan

Yusriani Halmin

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iii

PRAKATA iv

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Ruang Lingkup Penelitian 8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelabuhan Perikanan 9

B. Fungsi dan Peranan PPI 19

C. Tempat Pelelangan Ikan 22

D. Pengembangan PPI 25

E. Strategi Pegelolaan 32

F. Kerangka Pikir 34

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian 36

B. Lokasi dan Waktu 36

C. Populasi dan Teknik sampel 37

D. Instrumen Pengumpul Data 39

E. Analisa Data

1. Analisis Produksi dan Pendapatan 40

2. Analisa Pemasaran 41

a. Saluran Pemasaran 41

b. Margin Pemasaran 41

c. Biaya Pemasaran 42

d. Keuntungan Pemasaran 42

e. Efisiensi Pemasaran 42

3. Analisa Aspek Pengelolaan 43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pangkalan Pendaratan Ikan Sodohoa 47

1. Pengelolaan Pendaratan Ikan Sodohoa 47

2. Kedudukan Tugas dan Fungsi PPI Sodohoa 49

3. Sarana Fasilitas PPI Sodohoa 51

4. Alat Tangkap Yang digunakan 52

B. Analisis Produksi dan Pendapatan

1. Analisis Pendapatan Unit Penangkapan 59

2. Analisis Saluran Pemasaran di PPI-TPI Sodohoa 61

3. Analisis Margin Pemasaran 63

4. Analisis Biaya Pemasaran 66

5. Analisis Keuntungan Pemasaran 66

6. Analisis Efisiensi Pemasaran 67

C. Analisis Strategi Pengelolaan PPI Sodohoa

1. Matriks IFE dan Matriks EFE 68

2. Diagram SWOT 72

3. Matriks SWOT PPI Sodohoa 75

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

DAFTAR TABEL

nomor

halaman

1. Standar fungsi Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan Departemen Kelautan dan Perikanan 15

2. Standar Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan Departemen Kelautan dan Perikanan 16

3. Pembagian tipe Pelabuhan Perikanan menurut Fungsi Kapasitas distribusi Dan ruang lingkupnya 18

4. Kerangka Matriks SWOT 46

5. Sarana Fasilitas PPI Sodohoa Kendari 51

6. Perkembangan Unit Penangkapan Ikan Laut Menurut Jenis Alat Tangkap 52

7. Perkembangan Jumlah Armada Perikanan Laut Tahun 2011 53

8. Jumlah Armada Penangkapan Ikan yang Mendarat di PPI 54

9. Alat Penangkapan Ikan yang digunakan di PPI Sodohoa 56

10. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Kota Kendari 57

11. Data Produksi Ikan di PPI Sodohoa dalam 5 Tahun 58

12. Analisis Pendapatan Unit Penangkapan 59

13. Analisis R/C Ratio Unit Penangkapan 60

14. Analisis Margin Pemasaran 64

15. Analisis Efisiensi Pemasaran 67

16. Matrix Internal Factor Evaluation (IFE) 69

17. Matrix External Factor Evaluation (EFE) 71

DAFTAR GAMBAR

nomor
halaman

1. Kerangka Pikir Penelitian 35
2. Peta Lokasi Penelitian 36
3. Bagan Struktur Organisasi UPTD PPI Sodohoa 49
4. Lokasi PPI Sodohoa 50
5. Aktifitas Kegiatan di Dermaga 50
6. Persentase Jumlah Armada Perikanan Laut di Kota Kendari 54
7. Persentase Produksi Perikanan di Kota Kendari Tahun 2011 55
8. Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Kendari Tahun 2010-2011 55
9. Komposisi Produksi Perikanan Laut di Kota Kendari Tahun 2006-2010 56
10. Aktivitas Penangkapan dan Pembongkaran di PPI-TPI Sodohoa 57
11. Skema Saluran Pemasaran yang Terdapat di PPI Sodohoa 61
12. Persentase Pemasar Hasil Perikanan di Kota Kendari Berdasarkan Sarana yang Digunakan 63
13. Diagram SWOT 74

DAFTAR LAMPIRAN

nomor
halaman

1. Kuisioner SWOT 82
2. Daftar isian Analisis Pendapatan Unit Penangkapan 84
3. Daftar Isian Analisis Pemasaran 85
4. Perhitungan Pendapatan Unit Penangkapan dan R/C Ratio 75
5. Perhitungan Efisiensi Pemasaran 88
6. Pehitungan Rating Faktor Strategi Internal PPI Sodohoa
7. Pehitungan Rating Faktor Strategi Eksternal PPI Sodohoa 90
8. Daftar Nama-nama Responden 96

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis bahwa pengelolaan PPI/TPI Sodohoa Kendari, sumberdaya manusia serta fasilitas yang ada perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong peningkatan produksi danpendapatan nelayan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak maka tesis ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya. Olehnya itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada` :

1. Prof. Dr.Ir. Aris Baso, M.S. sebagai ketua komisi penasehat dan Prof. Dr.Ir. Achmar Mallawa, DEA. Sebagai anggota komisi penasehat sekaligus sebagai Ketua Program Studi S2 Ilmu Perikanan,yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya dalam penyusunan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
2. Ayahanda tercinta Drs.H.M.Yunus Halmin dan Drs.H.M. Nur Azikin dan ibunda Dra.Hj. Rosdiah dan Dra.Hj. Nurbayah serta saudara-saudaraku atas motivasi, bantuan dan doanya selama penulis mengikuti pendidikan.

3. Suami tercinta, Muh.Thahir Azikin, ST,MT serta ketiga buah hatiku Annisa Puji Lestari, M.Farhan dan M.Fathur Rahman yang telah mendoakan dan mendampingi dengan cinta dan kasih sayang selama penulis mengikuti pendidikan
4. Bapak dan ibu pengajar Pascasarjana Universitas Hasanuddin, yang banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan. Seluruh staf pengelola yang senantiasa membantu penulis mulai dari awal kuliah hingga penulis menyelesaikan studi
5. Teman-teman Ilmu Perikanan Angkatan 2011, dan kepada mereka yang namanya tidaktercantum tetapi telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis tidak dapat membalasa kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kasih sayang-Nya kepada hambanya yang berbuat baik.

Akhir kata, semogatulisan ini dapat memberikana manfaat bagi kita semua, saran dan kritik dari pembaca sangat penting untuk penyempurnaan tesis ini, Amin. Terima kasih.

Makassar, 2013

Yusriani Halmin

BIODATA

A. Data Pribadi

1. Nama : Yusriani Halmin
2. Tempat, tgl lahir : Kendari, 2 Desember 1975
3. Alamat : BTP.Jl. Keindahan 2 Blok AA/79 Makassar
4. Status Sipil
   a. Nama suami : M. Thahir Azikin, ST,MT
   b. Nama anak : 1. Annisa Puji Lestari Thahir
      2. Muh. Farhan Thahir
      3. Muh. Fathur Rahman Thahir
      4. Mutia Kamila Thahir

B. Riwayat Pendidikan

a. **Pendidikan Formal :**

- Tamat SD tahun 1988 di Kendari
- Tamat SLTP tahun 1991 di Kendari
- Tamat SLTA tahun 1994 di Kendari
- Sarjana (S1) tahun 1999 di Universitas Muslim Indonesia
- Magister (S2) tahun 2013 di Universitas Hasanuddin

b. Pendidikan Non Formal : -

C. Pekerjaan dan Riwayat Pekerjaan

- Pekerjaan : PNS, Pemerintah Daerah Kota Kendari
- NIP : 19752102 200112 2007
- Pangkat : Penata, Gol. III/C

D. Karya ilmiah/Artikel jurnal yang telah dipublikasikan : -

E. Makalah pada seminar : -

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki potensi maritim yang tinggi dengan wilayah seluas 2,8 juta km2 dengan bentangan garis pantai sepanjang 80.791 km2 sudah seharusnya menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan nasional dan regional. Dengan adanya prospek yang cukup menjanjikan, sektor perikanan dan kelautan sudah semestinya mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Namun saat ini dirasakan potensi pasar yang besar tadi belum dapat dijangkau optimal oleh produksi perikanan Indonesia, selain itu permasalahan di bidang perikanan sangat kompleks. di bidang perikanan tangkap misalnya, mulai dari rendahnya produktifitas nelayan, masalah permodalan, keterbatasan infrastruktur pendukung hingga masalah kebijakan yang belum memberikan hasil signifikan bagi kegiatan pengembangan sektor perikanan tangkap. Keberhasilan kegiatan perikanan tidak dapat dipisahkan oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, salah satu yang erat kaitannya dengan pengembangan perikanan khususnya perikanan laut adalah pelabuhan perikanan (PP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan, (Muninggar, 2006).

Kebijakan umum prasarana perikanan tangkap yang disusun Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) adalah berorientasi pada

kepentingan nasional melalui suistainable development, berorientasi pada kelembagaan dan ekonomi seluruh stakeholders perikanan, dan penataan PP/PPI dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi distribusi produk perikanan. Jika ditinjau dari sisi finansial, pengelolaan pelabuhan seharusnya dapat memberikan pelayanan optimal sekaligus profit (keuntungan). Minimal , biaya investasi yang dikeluarkan dapat ditutupi dengan pendapatan (revenue) pelabuhan dalam suatu periode tertentu . Selama ini, pendapatan pelabuhan dikelola dengan system tarif jasa pelabuhan dan tujuannya adalah untuk kepentingan publik, sehingga manajemen Pelabuhan Perikanan masih dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Karena itu, paradigma sektor perikanan dan kelautan sudah seharusnya diarahkan pada pengembangan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan menstimulasi pengembangan perikanan berskala industri dengan memperhatikan dimensi *environmental friendly, economically sound dan socially just* (Muninggar R.,*dalam* Monintja, 2006)

Berdasarkan UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Serta ayat 7 disebutkan bahwa Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis,

perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perikanan tersebut salah satu hal yang paling penting diperhatikan adalah pembangunan prasarana. Khusus untuk perikanan tangkap prasarana yang dimaksud adalah "Pelabuhan Perikanan" yang berfungsi sebagai sarana penunjang peningkatan produksi. Kata pengelolaan itu sendiri memiliki arti yang luas mencakup aktivitas pembangunan. Adapun pembangunan perikanan adalah aktivitas pengelolaan sumber daya perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi serta membawa manfaat sosial kepada masyarakat.

Luas wilayah perairan Kota Kendari adalah 177,6 km2 dimana panjang garis pantai adalah 85,6 km2. Sektor kelautan dan perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pangan daerah, serta penyediaan lapangan kerja produktif bagi penduduk. Secara geografis perairan lautnya berhadapan lansung dan relatif dekat dengan laut banda yang kaya dengan sumberdaya alam kelautan dan perikanan. Peningkatan produksi perikanan di Kota Kendari saat ini

ditempuh melalui upaya-upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, baik kegiatan penangkapan maupun usaha budidaya. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan ekspor, perdagangan antar pulau, peningkatan konsumsi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani nelayan dan masyarakat pada umumnya. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dalam rangka peningkatan produksi tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber hayati perikanan. Produksi Perikanan Kota Kendari Tahun 2011 adalah tercatat 28.566,866 ton dengan nilai Rp. 282.918.636,- atau mengalami peningkatan volume dari tahun 2010 sebesar 1,05 % dan nilai sebesar 1,03 %. Hal ini menunjukkan bahwa produksi perikanan Tahun 2011 mengalami peningkatan.

Dalam Pengoperasiannya PPI Sodohoa telah memanfaatkan segala fasilitas yang ada untuk menunjang berbagai aktifitas kegiatan perikanan, namun demikian walaupun PPI Sodohoa ini telah berfungsi, namun kendala dan hambatan masih ditemukan dalam kegiatan operasional dilapangan, sehingga layanan yang diberikan belum optimal dalam menunjang aktifitas perikanan di daerah ini. Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan peran sub sektor perikanan dalam mensejahterakan nelayan dan petani ikan serta masyarakat pada umumnya, banyak pihak yang menghendaki adanya perubahan-perubahan mendasar baik dalam hal paradigma, maupun kebijaksanaan. Kebijakan Strategis

pembangunan Perikanan dan Kelautan Kota Kendari, tetap bertumpu pada potensi sumberdaya perikanan yang ada dengan tetap memperhatikan skala prioritas sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan pembangunan daerah dan sektor Perikanan dan Kelautan secara umum, disamping itu diharapkan dapat lebih mendorong, menjamin dan mengembangkan seluruh potensi perikanan yang ada secara berkelanjutan guna meningkatkan kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat nelayan, (DKP Kota Kendari, 2012)

PPI/TPI Kendari yang berada dikelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat dibangun pada tahun 1977-1978 yang berfungsi sebagai pusat pendaratan ikan (PPI) dan pusat pengembangan perekonomian masyarakat nelayan mulai berperan aktif tahun 1979 dengan dasar perda nomor 3 Tahun 1964 tentang pelelangan ikan. PPI/TPI Sodohoa saat ini menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Berdasarkan perda Kota Kendari nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari dan Keputusan Walikota Kendari nomor 239 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dalam pengoperasiannya PPI Sodohoa telah memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menunjang berbagai aktifitas kegiatan perikanan, maka tata kelola dari PPI Sodohoa harus kita ketahui, bagaimana pengelolaan dari PPI ini, apakah sarana dan prasarana yang ada telah menunjang aktifitas kegiatan perikanan, dimana hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan

produksi dan kesejahteraan nelayan itu sendiri. Selama ini kontribusi dari PPI Sodohoa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan belum diketahui secara pasti, begitupula dengan kondisi dari PPI bagaimana manajemen serta pengembangan dari PPI ini, untuk mengetahui semua itu maka penelitian mengenai strategi pengelolaan dari PPI Sodohoa Kendari diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah Kota Kendari dan stakeholder untuk lebih mengetahui bagaimana strategi pengelolaan yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan di Kota Kendari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Manajemen operasional PPI Sodohoa sehingga produksi dapat meningkat dan pendapatan usaha unit penangkapan yang ada di PPI
2. Bagaimana proses pemasaran hasil tangkapan di PPI
3. Bagaimana Upaya pengelolaan dari PPI Sodohoa sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan.
4. Strategi yang bagaimana yang efektif untuk pengelolaan PPI Sodohoa dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Manajemen operasional dan pendapatan unit penangkapan yang memanfaatkan prasarana/fasilitas di PPI Sodohoa.
2. Menganalisis proses pemasaran produksi hasil tangkapan nelayan dalam upaya meningkatkan pemasaran yang efisien.
3. Menganalisis strategi pengelolaan pada PPI Sodohoa dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kondisi PPI Sodohoa, Kendari. Ditinjau dari kapasitas dan beberapa fasilitas yang ada, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi stakehokders dalam kegiatan usaha perikanan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Sodohoa.
3. Dapat membantu para nelayan di PPI Sodohoa untuk meningkatkan produksi dan pendapatan .

E. Ruang Lingkup Penelitian

Kajian dilakukan terhadap faktor-faktor yang terkait dengan fasilitas yang ada di PPI Sodohoa dan juga aktifitas tataniaga perikanan yang sedang terjadi. Fokus dari penelitian ini adalah dengan melakukan evaluasi atau kajian terhadap beberapa fasilitas dan aktifitas PPI/TPI yang terkait dengan pengelolaan dan pendapatan unit penangkapan, pemasaran hasil tangkapan nelayan yang efisien serta melihar atau mengidentifikasikan beberapa faktor internal dan eksternal yang utama dan penting untuk dijadikan pijakan dalam strategi pengelolaannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelabuhan Perikanan

Dalam bidang kegiatan penangkapan ikan sesumgguhnya pelabuhan perikanan (PP) merupakan titik temu atau titik penyambung antara wilayah perairan atau *avanst pays maritime* (dapat disebut juga daerah penangkapan ikan atau daerah produksi penangkapan ikan) dan wilayah daratan atau *arriere-pays terrestre* (disebut juga daerah distribusi dan konsumsi perikanan laut). Fungsinya antara lain sebagai tempat berlindung, tempat pendaratan hasil tangkapan dan tempat pemberangkatan serta berlabuhnya armada penangkapan ikan. Termasuk didalamnya semua aktivitas yang berhubungan dengan pembangunan, perbaikan dan perawatan kapal. Pelabuhan Perikanan (PP) juga merupakan zona transit bahkan tempat pengolahan ikan dan memiliki kantor administrasi, koperasi dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya pelabuhan perikanan (PP) atau pangkalan pendaratan ikan (PPI) seyogyanya berdekatan dengan zona pemukiman masyarakat pantai beserta aktivitas perdagannya dan bahkan kadang-kadang juga pemukiman-pemukiman nelayan yang merupakan bagian dari perkembangan kota (Lubis dan Pane, 2006).

Untuk perikanan berkelanjutan membutuhkan infrastruktur yang baik, termasuk pusat pendaratan ikan, fasilitas pengolahan, kapasitas pendinginan dan efisien transportasi. Sesuai dengan standar-standar dapat merupakan tantangan khusus negara untuk mengembangkan.

Karena biaya tinggi untuk bisnis, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Individu Mendorong investasi dalam perikanan yang berkelanjutan, investasi dalam perikanan yang lebih berkelanjutan mengelola, pemerintah bisa membantu kelangsungan hidup jangka panjang perikanan dan komunitas nelayan dengan membangun kembali populasi dan memulihkan ekosistem ikan . Subsidi Perikanan yang mempromosikan kelebihan kapasitas bisa rechanneled untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan skema dan pemahaman ilmiah yang lebih baik mengenai lautan, serta kompensasi dan melatih pekerjan dalam bidang perikanan (Brief, 2012)

Obyek utama dari kebijakan Perikanan adalah sumberdaya ikan dan nelayan sebagai pemanfaat sumberdaya ikan tersebut. Kebijakan pengelolaan perikanan sudah semestinya tidak hanya berupa aturan atau regulasi yang mengontrol akses terhadap pemanfaatan sumberdaya yang ada, tapi harus mampu membangun dan memberdayakan komunitas perikanan supaya dapat menyusun aturan dan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, melalui pembentukan *capacity building dan institutional building*. Untuk itu semua, maka perumusan kebijakan perikanan tangkap tidak hanya dilakukan dengan analisis teknis biologi (stok sumberdaya atau bio-ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek manajemen sumberdaya manusia dan analisis kebijakan pembangunan perikanan dari pengalaman negara lain.

Seperti diungkapkan di atas, bahwa kebijakan perikanan bukan hanya menyangkut masalah berapa banyak ikan yang boleh ditangkap, akan tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan yang memanfaatkan ikan (Wiyono,S,E., *dalam* Monintja, 2006).

Bahwa pertimbangan yang sangat mendasar dari setiap konsep manajemen modern seperti perencanaan, tanggung jawab organisasi dan lain-lain, dengan menekankan bahwa keberlanjutan operasional dari pelabuhan perikanan modern salah satunya dengan memperhatikan fungsi kinerja dari pelabuhan perikanan itu. Adanya kerumitan faktor external dan internal dari pelabuhan perikanan menuntut sebuah konsep yang mampu mengenali perubahan dan resiko di pelabuhan, sehingga manajemen sangat penting untuk keberlanjutan operasional dari pelabuhan tersebut (Scheffzyk, 2005)

Pengelolaan perikanan bertujuan untuk mengembangkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan perikanan. Bahwa masyarakat berbasis koperasi perikanan manajemen merupakan salah satu pendekatan hak milik dalam manajemen perikanan. Berbasis masyarakat koperasi perikanan manajemen adalah sistem dimana wewenang dan tanggung jawab atas sumber daya lokal dan pemerintah, seperti dalam pengelolaan bersama dan berbasis masyarakat (Bulayi, 2001)

Saat ini dengan terbentuknya departemen yang menangani perikanan dan kelautan, diharapkan dapat diupayakan penerapan sistem

baru yang mengadopsi *fishing fee.* Bahwa dengan system pungutan ini, pemerintah dapat memperoleh penerimaan dari sumber daya perikanan yang substansial di samping tersedianya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya perikanan (Fauzi, 2005)

1. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Menurut UUD No. 45 (1)Tahun 2009 tentang Perikanan,

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan bahwa Pelabuhan Perikanan No. PER. 16/MEN/2006 Tentang Pelabuhan Perikanan. Bahwa Pelabuhan Perikanan di bagi dalam 4 (empat) kelas, yaitu :

a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

Pelabuhan ini direncanakan terutama untuk mendukung kegiatan penangkapan

ikan di perairan wilayah ZEE Indonesia dan perairan internasional. Lokasi pelabuhan dimaksud di DKI Jakarta dan Kendari (Sulawesi Tenggara).

Pelabuhan Perikanan Samudera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

1. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut toriteria , Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas;
2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 60 GT;
3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam
   sekurangkurangnya minus 3 m;
4. mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT kapal perikanan sekaligus;
5. ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor; terdapat kriteria perikanan.

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);

Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

1. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut toriterial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 30 GT;
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurangkurangnya minus 3 m;

4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus;

c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);

Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

1. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 10 GT;
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
3. Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.

d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

1. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan;
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 3 GT;

3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam minus 2 m;
4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.

Berikut fungsi dan fasilitas yang harus dimiliki sebuah pelabuhan perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/ MEN/ 2006.

Tabel 1. Standar Fungsi Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan Departemen Kelautan dan Perikanan

No	FUNGSI	STANDAR YANG DITETAPKAN
1	Umum	• Kedalaman perairan memasuki pelabuhan • Tanda – tanda Navigasi kepelabuhan agar kapal-kapal dapat melakukan olah gerak kapal di pelabuhan dengan lebih mudah dan aman • Kolam pelabuhan yang memadai baik luas maupun kedalamannya serta terlindung dari gelombang dan arus yang kuat saat melakukan kegiatan di pelabuhan • Membangun pemecah gelombang (*break water*) • Dermaga yang cukup panjang dan luasnya untuk melayani kapal Berlabuh • Menyediakan fasilitas bahan kebutuhan pelayaran seperti; Bahan bakar minyak, Pelumas, air minum, listrik, sanitasi & kebersihan, saluran pembuangan sisa kotoran kapal, penanggulangan sampah

Lanjutan Tabel 1.

No	FUNGSI	STANDAR YANG DITETAPKAN
2.	Khusus	• Sistem pemadam kebakaran • Bangunan rumah dan perkantoran pelabuhan • Area di bagian laut dan darat untuk memperluas atau pengembangan pelabuhan • Jalan raya sebagai sarana transportasi Penghubung kegiatan pemasaran • Halaman tempat parkir • Fasilitas perbaikan dan perawatan kapal yang melayani kapal-kapal yang sifatnya sebagai dok perbengkelan dll. • Fasilitas pelelangan ikan • Fasilitas pengolahan seperti pengepakan, pengemasan coldstorage • Pabrik es • Fasilitas sarana produksi penengkapan ikan

Tabel 2. Standar Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan Departemen Kelautan dan Perikanan

NO.	FASILITAS	STANDAR YANG DITETAPKAN
1.	Fasilitas Pokok	• Fasilitas perlindungan kapal • Fasilitas tambat kapal • Fasilitas Perairan / Kolam pelabuhan
2.	Fasilitas Fungsional	• Transportasi • Bantuan petunjuk navigasi • Daratan tempat aktivitas • Suplay bahan bakar dan air tawar • Sarana Komunikasi • Sarana penanganan & pengolahan • Manajemen pelabuhan • Penanganan sisa minyak • Kebersihan / sanitasi

Pemerintah pusat masih memiliki wewenang atas seluruh pelabuhan perikanan tipe A,B namun hingga 25 Februari 2004, pengelolaan sejumlah pelabuhan perikanan tipe C telah diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka kebijakan desentralisasi/otonomi daerah yang dihendaki pemerintah Indonesia. Tipe-tipe pelabuhan perikanan lainnya masih menjadi wewenang pemerintah sebatas masih ada kaitannya dengan fungsi-fungsi lainnya (seperti fungsi ekspor) yang dalam hal ini pusat masih melakukan pengawasan. Kiranya pengklasifikasian suatu Pelabuhan perikanan (PP) dan pangkalan pendaratan ikan (PPI) hendaknya bersifat dinamis, tidak hanya berdasarkan kriteria administrasi belaka, tetapi lebih mementingkan pada aktivitas-aktivitas, teruatama volume dan nilai hasil tangkapan yang didaratakan. Dengan demikian pengklasifikasian PP dan PPI dapat berubah-ubah seiring perkembangan aktivitas-aktivitas termasuk kinerja didalamnya. Dinamisme klasifikasi ini akan merupakan dorongan didalam meningkatkan kinerja pengelola PP/PPI.(Lubis.,E dan Pane,B.A., dalam Monintja, 2006)

Berdasarkan jenis teknologi penangkapan ikan pelabuhan perikanan dibedakan menjadi : pangkalan mini trawl, pangkalan purse seine, pangkalan perikanan pancing dan sebagainya.

Tabel 3. Pembagian tipe pelabuhan perikanan menurut fungsi, kapasitas, distribusi dan ruang lingkupnya.

U r a i a n	Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A)	Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B)	Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C)	Pangkalan Pendaratan Ikan (tipe D)
Luas lahan (ha)	50	30 – 40	10 – 30	10
Fungsi	Nasional Internasional	Regional Nasional	Regional Lokal	Lokal
Kapasitas akomodasi . Ikan yang didaratkan (ton/hari) . Tonase kapal (GT) . Rata-rata kapal merapat (unit/hari)	 > 100 >100 100	 50 – 100 50 – 100 50	 20 – 50 5 – 30 25	 < 20 < 5 15
Armada Penangkapan . Jumlah trip/tahun (trip/tahun) . Jumlah merapat pertahun (kapal/tahun)	 18 1.800	 36 2.160	 72 3.600	 > 72 -
Distribusi	Interinsulair Nasional Internasional	Interinsulair Nasional Lokal	Lokal Antar daerah	Lokal
Daerah Penangkapan	Teritorial ZEE-I Internasional	Teritorial ZEE-I	Pantai Teritorial	Pedalaman Pantai
Fasilitas Pembinaan Mutu	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Jarang ada
Sarana Pemasaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Pengembangan Industri	Tersedia	Tersedia	Jarang ada	Tersedia

Sumber : Dirjen Perikanan (1981b), Direktorat Bina Sarana Perikanan (1994), KepMen Kelautan dan Perikanan No.10/Men/2004.

B. Fungsi dan Peranan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat bertambat dan labuh perahu / kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan melelangkannya yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum serta jasa, untuk memperlancar kegiatan usaha perikanan baik penangkapan ikan maupun pengolahannya. Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai salah satu unsur prasarana ekonomi, dibangun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan perikanan, terutama perikanan skala kecil.

Sesuai dengan fungsinya, ruang lingkup kegiatan PPI meliputi tiga hal pokok :

a. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, meliputi ; tambat labuh perahu / kapal perikanan, bongkar muat hasil tangkapan, penyaluran perbekalan kapal dan awak kapal serta pemeliharaan kapal dan alat-alat perikanan.
b. Kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil meliputi ; penanganan hasil tangkapan, pelelangan ikan, pengepakan, penyaluran / distribusi, pengolahan dan pengawetan.
c. Kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan, meliputi penyuluhan dan pelatihan, pengaturan (keamanan, pengawasan dan perizinan), pengumpulan data statistik perikanan serta pembinaan perkoperasian dan ketrampilan nelayan.

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Fasilitas Pelabuhan Perikanan adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Pelabuhan Perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan.

Fasilitas yang terdapat di Pelabuhan perikanan terdiri dari fasilitas dasar (pokok), fasilitas fungsional dan fasilitas pendukung (Permen Kelautan dan Perikanan no.16/MEN/2006)

1. Fasilitas Pokok

   Merupakan fasilitas yang harus ada pada pelabuhan merupakan tempat bongkar muat ikan hasil tangkapan serta berlabuh kapal-kapal penangkap ikan. Fasilitas dasar ini meliputi :

   - Pelindung seperti breakwater, revetment dan groin dalam hal secara teknis diperlukan
   - Tambat seperti dermaga dan jetty
   - Perairan seperti kolam dan alur pelayaran
   - Penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, jembatan

2. Fasilitas Fungsional

   Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud meliputi:

   a. Pemasaran hasil perikanan seperti tempat pelelangan ikan (TPI);

b. Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, SSB, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas;

c. Suplai air bersih, es dan listrik;

d. Pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;

e. Penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu;

f. Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan;

g. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es; dan pengolahan limbah seperti IPAL.

3. Fasilitas penunjang ,sekurangkurangnya meliputi:

a. Pembinaan nelayan seperti balai pertemuan nelayan;

b. Pengelola pelabuhan seperti mess operator, pos jaga, dan pos pelayanan terpadu;

c. Sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK;

d. Kios IPTEK;

e. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Menurut Damaredjo dalam Muljono, 2005. Untuk mendukung peranan pelabuhan perikanan tersebut dalam operasionalnya diperlukan fasilitas-fasilitas yang dapat :

a. Memperlancar kegiatan produksi dan pemasaran hasil tangkapan.

b. Menimbulkan rasa aman bagi nelayan terhadap gangguan alam dan manusia.

c. Mempermudah dalam pembinaan serta menunjang pengorganisasian usaha nelayan dalam unit ekonomi.

C. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pelelangan adalah suatu tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar menawar harga ikan yang mereka sepakati bersama. Yang lebih penting daripada aspek pelelangan adalah sistem pelelangannya. Tujuan sesungguhnya daripada sistem pelelangan di daerah produksi adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual ikan hasil tangkapa

nelayan pada tingkat harga yang menguntungkan nelayan tanpa merugikan pedagang pengumpul. Dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita nelayan, maka pemerintah berkewajiban membina/mengembangkan sistem pelelangan pada setiap pelelangan ikan (TPI) yang sudah ada dan *market hall* yang akan dibangun, sehingga tujuan daripada sistem pelelangan yang sesungguhnya tercapai (Saefuddin dan Hanafiah, 1986).

Ikan merupakan komoditi yang mudah busuk. Sesudah diangkat dari kapal, ikan harus segera ditangani secara tepat untuk mempertahankan mutu ikan secara maksimum. Sistem pemasaran menjadi kompleks karena sifatnya yang mudah busuk.

Beberapa cara pelayanan untuk mendistribusikan produk perikanan yang dapat dilakukan :

1. Melalui tempat pelelangan ikan di pelabuhan perikanan dan pasar induk di luar kotasebelum akhirnya sampai pada konsumen.
2. Diangkut dengan kapal langsung ke pasar di kota konsumen tanpa melewati tempat pelelangan ikan.
3. Para pengolah membeli ikan untuk bahan mentah di tempat pelelangan.
4. Setelah membeli ikan di pelelangan ikan, tengkulak memasok para konsumen di lingkungan perkotaan seperti restoran, pabrik, rumah sakit, pasar swalayan dan sebagainya.

Hasil tangkapan yang dibongkar dari kapal ikan perlu mendapatkan pelayanan yang memudahkan terlaksananya pekerjaan dalam serangkaian proses seperti sortasi, pencucian, penimbangan, penjualan dan pengepakan di tempat pelelangan ikan (TPI) tersebut. Setelah itu ikan dikirim sebagian untuk konsumsi lokal dalam bentuk segar, sebagian lainnya ke pabrik untuk prosesing dan sisanya ke tempat pembekuan ikan untuk diawetkan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional yang disediakan di setiap Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dengan demikian TPI merupakan bagian dari pengelolaan PPI. Fasilitas lain yang disediakan oleh PPI adalah fasilitas dasar seperti dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran serta fasilitas penunjang seperti gudang, MCK, keamanan dan lain sebagainya.

Berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan

Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelengaraan tempat pelelangan ikan, bahwa yang disebut dengan Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.

Ikan hasil tangkapan para nelayan harus dijual di TPI kecuali :

a. Ikan yang digunakan untuk keperluan lauk keluarga
b. Ikan jenis tertentu yang diekspor dan ikan hasil tangkapan pola kemitraan dengan pertimbangan dan atas dasar persetujuan dari Kepala Daerah. (Dyah P., 2005)

Dalam pengelolaan TPI, perlu memperhatikan adanya penetapan harga standar, sehingga memberikan rasa kepuasan baik pembeli maupun penjual. Apabila standar harga yang ditentukan dapat sesuai dengan harga pasar yang ada maka TPI Sodohoa Kendari dapat dikatakan pengelolaan di TPI ini baik. Keberadaan TPI Sodohoa tentu akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat nelayan di Kota Kendari, tentu hal ini harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang baik, didukung pula kebijakan dari Pemerintah Kota Kendari.

D. Pengembangan PPI

Secara teknis pengembangan prasarana pelabuhan perikanan dikaji berdasarkan peluang pengembangan. Peluang pengembangan pelabuhan di suatu wilayah perikanan ditentukan oleh berbagai macam faktor, namun dapat dikelompokkan dalam 5 aspek, yakni: (1) Aspek sumber daya ikan; (2) Aspek armada penangkapan; (3) Aspek ekonomi; (4) Aspek fisik lingkungan dan (5) Aspek layananpendukung/kelembagaan (Diskanlut Prop.Sulsel, 2005).

Aspek teknis merupakan aspek yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan pengembangan fasilitas pangkalan pendaratan ikan. Aspek pemasaran dan aspek ekonomi adalah aspek pendukung pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan.

1. Aspek Teknis

Aspek teknis merupakan aspek yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan. Kajian aspek teknis menitikberatkan pada penilaian atas kelayakan dari sisi teknis. Penilaian tersebut meliputi : daya dukung fisik dan lingkungan, kolam dan alur pelabuhan serta potensi sumberdaya ikan.

a. Daya Dukung Fisik dan Lingkungan

Dalam hal ini aspek yang dikaji mengenai daya dukung apa saja dari segi fisik dan lingkungan yang ada di pangkalan pendaratan ikan untuk mendukung pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan.

Daya dukung fisik dan lingkungan lebih berorientasi pada situasi dan kondisi (keadaan) secara fisik dan lingkungan yang ada di pangkalan pendaratan ikan.

Ada beberapa hal yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kelayakan daya dukung fisik dan lingkungan, diantaranya meliputi:

1 Kondisi lokasi yang akan dijadikan pusat pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan ikan.
2 Keadaan dan kondisi lahan, luas lahan dan status lahan yang akan digunakan untuk pengembangan fasilitas pangkalan pendaratan ikan.
3. Adanya perlindungan baik secara alami atau buatan terhadap fasilitas pangkalan pendaratan ikan
4. Terdapat sarana dan prasarana pendukung yang memungkinkan adanya pengembangan fasilitas pangkalan pendaratan ikan.

b. Kolam dan Alur Pelayaran

Kolam dan alur pelayaran merupakan salah satu aspek penting dalam aspek teknis, karena berhubungan langsung dengan kegiatan lalu lintas kapal/perahu nelayan. Kelancaran lalu lintas kapal/perahu nelayan akan memudahkan dan mempersingkat waktu bongkar hasil penangkapan ikan dan akan banyak kapal/perahu nelayan yang masuk ke Pangkalan Pendaratan ikan.

Dengan banyaknya kapal/perahu yang masuk ke Pangkalan Pendaratan Ikan, akan menambah jumlah produksi ikan yang dihasilkan.

Dengan meningkatnya jumlah produksi ikan, dengan sendirinya pendapatan akan meningkat. Kelancaran arus lalu lintas kapal tidak terlepas dari luas serta kedalaman kolam dan alur pelayaran, dimana kedalaman tersebut dipengaruhi oleh sedimentasi yang terjadi di dasar kolam dan alur pelayaran. Sehingga untuk menentukan kelayakan kolam dan alur pelayaran, ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan diantaranya meliputi :

1. Luas dan kolam alur pelayaran harus memenuhi kebutuhan.
2. Tingkat sedimentasi yang terjadi diusahakan seminimal mungkin.
3. Adanya perawatan yaitu pengerukan rutin dalam jangka waktu tertentu agar kolam dan alur tidak mengalami pendangkalan.

c. Potensi Sumberdaya Ikan

Kelayakan potensi sumberdaya ikan lebih menekankan pada potensi ikan yang terkandung di daerah penangkapan ikan (fishing ground). Potensi sumberdaya ikan terkait langsung dengan potensi lestari serta peluang pengembangan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan. Karena daerah penangkapan ikan (fishing ground) Pangkalan Pendaratan Ikan berada di wilayah pengelolaan perikanan. Potensi sumberdaya ikan perlu diketahui karena akan mempengaruhi jumlah produksi ikan yang diperoleh dan dihasilkan nelayan. Kelayakan dari potensi sumberdaya ikan adalah untuk mengetahui potensi yang terkandung didalamnya sehingga pengembangan fasilitas Pangkalan

Pendaratan Ikan tidak sia-sia, karena didukung oleh potensi sumberdaya ikan yang ada serta adanya peluang pengembangan.

Untuk menentukan kelayakan potensi sumberdaya ikan, ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan diantaranya meliputi:

1. Luas daerah penangkapan ikan (fishing ground).
2. Potensi lestari yang terkandung didalamnya.
3. Adanya peluang pengembangan.

2. Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran merupakan salah satu aspek pendukung pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan. Aspek pemasaran berkaitan dengan pemasaran dan pendistribusian ikan hasil lelang. Menurut Soekartawi (1993 : 153), bahwa pemasaran atau marketing pada prinsipnya adalah aliran barang dari produsen ke konsumen. Aliran barang ini dapat terjadi karena adanya peranan lembaga pemasaran. Peranan lembaga pemasaran sangat tergantung dari sistem pasar yang berlaku, oleh karena itu dikenal istilah saluran pemasaran atau *marketing channel*.

a. Saluran pemasaran

Saluran pemasaran dapat berbentuk secara sederhana dan dapat pula rumit sekali. Hal demikian tergantung dari macam komoditi lembaga pemasaran dan sistem pasar, berikut adalah salah contoh saluran pemasaran :

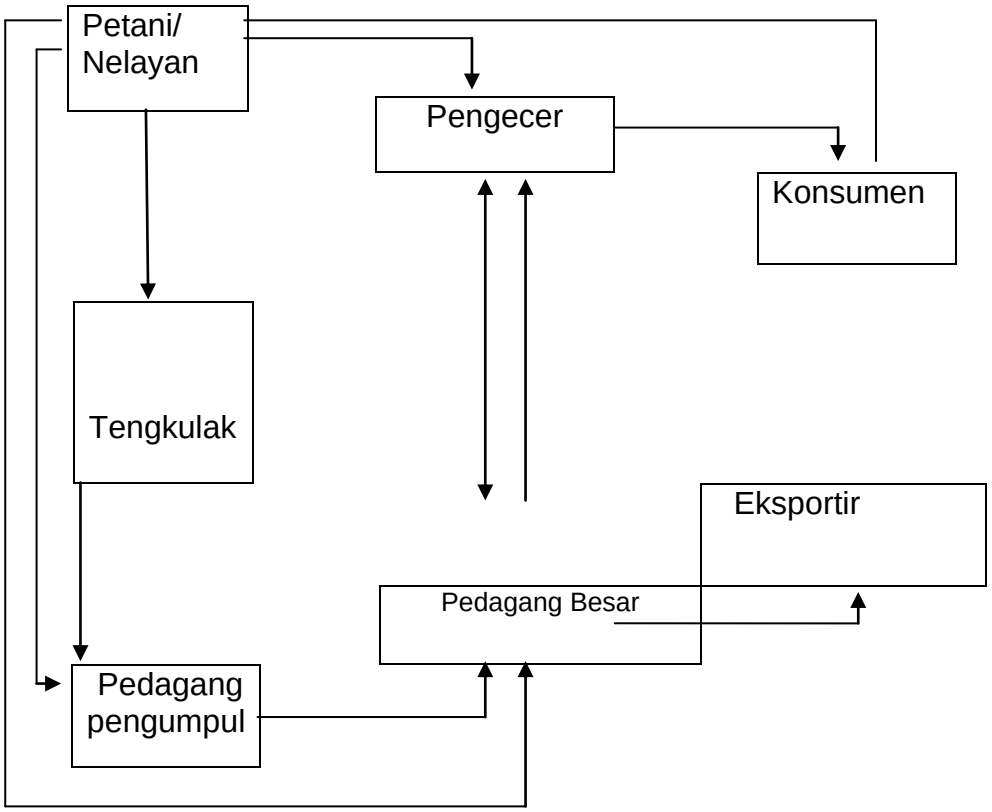

Gambar 1. Skema Saluran Pemasaran

b. Biaya Pemasaran

Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran. Biaya pemasaran ini meliputi biaya angkut, pungutan retribusi dan lain-lain. Besarnya biaya pemasaran ini berbeda satu sama lain disebabkan karena macam komoditi, lokasi pemasaran dan macam lembaga dan efektifitas dari pemasaran. Seringkali komoditi pertanian/perikanan yang nilainya tinggi diikuti dengan biaya pemasaran yang tinggi pula, peraturan pemasaran disuatu daerah juga kadang-kadang berbeda satu sama lain,

begitupula macam lembaga dan efektifitas dari pemasaran. Makin efektif pemasaran yang dilakukan, makin kecil biaya pemasaran yang dikeluarkan.

c. Keuntungan Pemasaran

Selisih harga yang yang dibayarkan ke produsen dan harga yang diberikan oleh konsumen disebut keuntungan pemasaran. Jarak yang yang mengantarkan produksi dari produsen ke konsumen menyebabkan terjadinya perbedaan keuntungan pemasaran. Begitupula produsen tidak dapat tidak dapat bekerja sendiri untuk memasarkan hasil produksinya, maka mereka memerlukan pihak lain atau lembaga pemasaran yang lainuntuk membantu pemasaran produksi yang dihasilkan. Karena masing-masing lembaga ini ingin memperoleh keuntungan, maka harga yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga itu akan berbeda pula sehingga munculla istilah pedagang pengumpul, pedagang eceran dan sebagainya.

d. Efisiensi Pemasaran

Menurut pendapat Sheperd dalam Soekartawi (1993:161), menyatakan bahwa efisiensi pemasaran adalah nisba antara total biaya dengan total nilai produk yang dipasarkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa setiap ada penambahan biaya pemasaran memberi arti bahwa hal tersebut menyebabkan adanya pemasaran yang tidak efisien. Begitupula sebaliknya, kalau semakin

kecil nilai produk yang dijual berarti pula terjadi adanya pemasaran yang tidak efisien.

Sedangkan menurut Rashid dan Chaundry dalam Soekartawi (1993:161) menyatakan bahwa efisiensi pemasaran terdiri dari efisiensi teknis dan ekonomis. Efisiensi teknis dalam kegiatan pemasaran adalah berkaitan dengan efektivitas dalam hubungan dengan aspek fisik dalam kegiatan pemasaran, sedangkan efesiensi ekonomi berkaitan dengan efektivitas dalam kegiatan fungsi pemasaran dilihat dari segi keuntungan.

3. Aspek Ekonomi

Analisis kelayakan dari aspek ekonomi adalah menitik beratkan pada manfaat yang diterima oleh masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah secara makro. Kelayakan pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan dari aspek ekonomi dilakukan untuk mengetahui manfaat yang akan diperoleh /nelayan masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah. Aspek ekonomi erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat pada khususnya dan kesejahteraan daerah pada umumnya. Pengembangan fasilitas pangkalan pendaratan ikan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat nelayan sendiri serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah (Bustami, 2013)

Sementara dukungan pemerintah untuk perikanan memiliki efek berkelanjutan pada aspek pembangunan perpindahan keuangan pada

dasarnya merupakan kebijakan ekonomi instrumen yang dirancang untuk mengurangi biaya atau meningkatkan pendapatan nelayan dan lain-lain. Pada sektor ini ironisnya untuk jangka pendek dampak positif pada keuntungan dapat melemahkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan mengubah insentif menghadapi nelayan, dampak ekonomi akan mengalir melalui ke lingkungan dan dimensi social. Subsidi atau hibah untuk membangun atau memodernisasi kapal nelayan memiliki dampak langsung terhadap keuntungan, Dampak keseluruhan dari transfer tersebut akan tergantung pada jenis sistem manajemen, seberapa efektif peraturan manajemen ditegakkan,dan apakah ada overfishing.

Pemerintah memberi dukungan keuangan akan menyebabkan investasi dalam peralatan baru dan lebih intensif penggunaan kapal yang ada. Dalam jangka pendek, hal ini akan mengakibatkan peningkatan tangkapan tetapi, dalam jangka panjang, hal itu akan mengurangi stok ikan, akhirnya mengarah untuk menurunkan menangkap dengan biaya yang lebih tinggi dan pendapatan rendah (OECD, 2005).

E. Strategi Pengelolaan

Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembangunan perikanan adalah analisis keragaman yang dikenal dengan analisis

SWOT. Analisis SWOT ini umumnya digunakan karena memiliki kelebihan yang sederhana, fleksibel, menyeluruh, menyatukan dan berkolaborasi. Dengan analisis ini akan dapat diketahui keterkaitan antara faktor internal dan faktor eksternal, sehingga dapat menghasilkan kemungkinan alterntif strategis (Rangkuti, F. dalam muljono,2005.). SWOT merupakan alat untuk menyusun suatu strategi dalam mengembangkan suatu usaha. SWOT merupakan singkatan dari *Strength*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Treath*. Kekuatan (*strength*) adalah unsur dari potensi sumberdaya yang dapat melindungi dari persaingan dan dapat menciptakan suatu kemajuan dalam suatu kegiatan atau usaha. Kelemahan (*weakness*) adalah unsur dari potensi sumberdaya yang tidak dapat menciptakan suatu kemajuan dalam kegiatan atau usaha. Peluang (*opportunity*) adalah unsur lingkungan yang dapat memungkinkan suatu kegiatan atau usaha untuk mendapatkan keberhasilan yang tinggi. Ancaman (*treath*) adalah unsur lingkungan yang dapat mengganggu atau menghalangi suatu kegiatan atau usaha jika tidak ada tindakan tegas yang segera diambil (Kotler dan Bloom, dalam muljono, 2005). Dengan memilih alternatif strategi yang terbaik untuk diterapkan, maka setiap alternatif yang ada diberi nilai sesuai dengan tingkat kepentingannya, kemudian diberi ranking dan ini dilakukan

secara obyektif. Nilai-nilai yang diberikan pada masing-masing unsur dilakukan dengan melihat hubungan serta pengaruhnya bagi kepentingan pembangunan PPI/TPI . Hal-hal yang paling mendasar dan sangat berpengaruh bagi kepentingan pengembangan, akan memperoleh nilai yang lebih besar.

F. Kerangka Pikir

Pangkalan pendaratan ikan merupakan tempat berlabuh kapal perikanan dan pendaratan hasil perikanan. Bahwa pengelolaan prasarana ini dikaji berdasarkan peluang pengembangan yang ditentukan oleh berbagai macam faktor diantaranya adalah aspek teknis, kelembagaan dan ekonomi.

Kerangka berfikir penelitian ini diawali dengan latar belakang bahwa PPI merupakan prasarana dimana pengelolaan PPI ini dapat meningkatkan pendapatan nelayan, sehingga aspek-aspek yang terkait di dalamnya sangat penting dalam kegiatan di PPI ini. Untuk dapat mencapat tujuan dari pengelolaan PPI maka masalah yang terdapat di PPI ini perlu dianalisis mengenai manajemen operasional dengan metode deskriftif, analisis pendapatan unit pendapatan kemudian diterapkan pula analisis R/C, dapat menganalisis proses pemasaran produk hasil tangkapan serta membuat strategi pengelolaan PPI dengan analis SWOT.

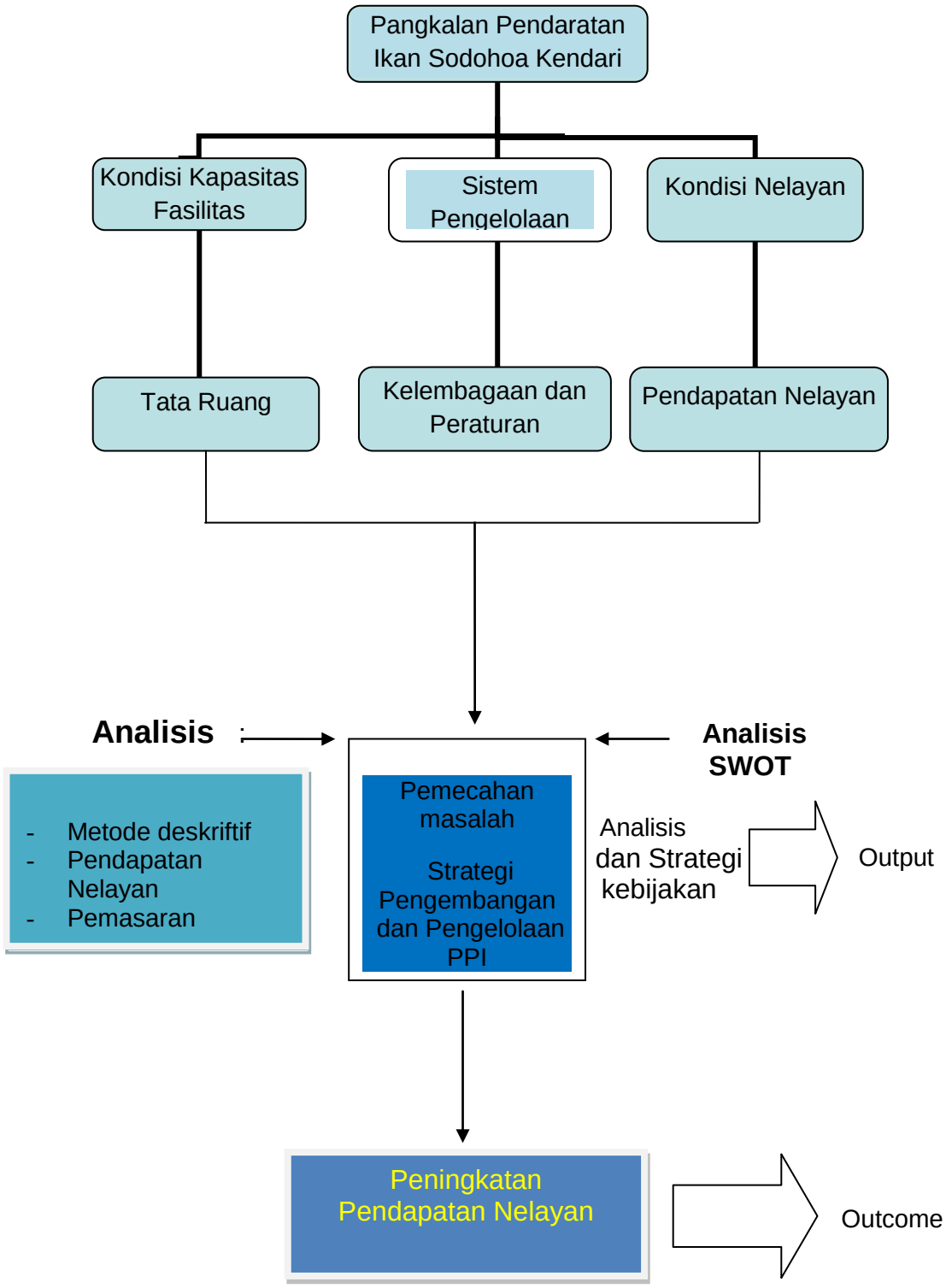

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian